

Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan dalam Rangka Menghitung PPh Terutang PT. Gresik Migas (Perseroda)

Syahrani Amadea Iswanto

Universitas Muhammadiyah Gresik

Korespondensi penulis: syahraniamadea05@gmail.com

Suwandi Suwandi

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: suwandi@umg.ac.id

Abstract. Profit and loss report and balance sheet of PT. Gresik Migas, which adheres to Financial Accounting Standards (SAK), is included in financial reports based on research. Both internal and external parties use this report to calculate taxable income and make decisions. According to Income Tax (PSAK) No. 46, fiscal corrections are made to business income. These adjustments may be positive or negative. Fiscal adjustments address permanent and temporary gaps, resulting in fixed differences (retained earnings and transportation costs) and temporary differences (salary costs, taxes, communications, newspapers, cars, and human resource development). Higher profit margin for PT. Gresik Migas is affected by cost, sales and tax burdens of 0.20% in 2021–2022.

Keywords: Income Statement and Balance Sheet, Income Tax (PSAK) No. 46, Fiscal Adjustment

Abstrak. Laporan laba rugi dan neraca PT. Gresik Migas yang menganut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dimasukkan dalam laporan keuangan berdasarkan penelitian baik pihak internal maupun eksternal memanfaatkan laporan ini untuk menghitung penghasilan kena pajak dan mengambil keputusan. Menurut Pajak Penghasilan (PSAK) No. 46, koreksi fiskal dilakukan terhadap pendapatan usaha penyesuaian ini mungkin positif atau negatif. Penyesuaian fiskal mengatasi kesenjangan permanen dan sementara, yang menghasilkan perbedaan tetap (laba ditahan dan biaya transportasi) dan perbedaan sementara (biaya gaji, pajak, komunikasi, surat kabar, mobil, dan pengembangan SDM). Margin keuntungan yang lebih tinggi bagi PT. Gresik Migas terdampak oleh harga pokok, penjualan, dan beban pajak sebesar 0,20% pada tahun 2021–2022.

Kata kunci: Laporan Laba Rugi dan Neraca, Pajak Penghasilan (PSAK) No. 46, Penyesuaian Fiskal

LATAR BELAKANG

Sektor pajak saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan oleh pemerintah. Setiap dunia usaha tentunya mempunyai komitmen keuangan kepada pemerintah salah satunya yaitu membayar pajak, terutama pajak badan atau pajak perusahaan (Ngadiman, 2019). Wajib pajak badan berkewajiban menyetor, menghitung dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Louis, 2021). Posisi pajak di Indonesia sangat penting, pajak merupakan salah satu faktor kunci penggerak perekonomian Indonesia, selain membiayai kepentingan serta kesejahteraan masyarakat (Sitorus & Simanjuntak, 2023). Laporan keuangan adalah salah satu cara badan menampilkan pendapatannya. Saat menyampaikan laporan keuangan badan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Langsa et al., 2017). Komponen dari

sistem perpajakan saat ini adalah instruksi wajib pajak. Semua badan diwajibkan untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak pembangunan dan pendanaan pemerintah lebih terstruktur.

Koreksi Fiskal merupakan kegiatan yang akan diungkapkan oleh wajib pajak dalam rangka membenahi akuntansi keuangan (Ulhaq, 2021). Dengan adanya koreksi fiskal kita bisa mengetahui keakuratan perhitungan pajak terutang perusahaan, karena dengan adanya kesalahan sekecil apapun akan memiliki dampak yang sangat besar bagi perusahaan tersebut (Gunawan, 2020). Terdapat dua jenis cara di dalam pengakuan pendapatan dan beban pada koreksi fiskal yaitu perbedaan sementara (*temporary different*) maupun perbedaan tetap (*permanent different*) yang mengakibatkan koreksi positif dan negatif (Ainiyah, 2018). Kedua variasi ini juga dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak tangguhan berdasarkan persyaratan PSAK No.46 Akan adanya revisi apabila jika ditemukan draft laporan yang tidak sesuai dengan format yang standar perpajakan (Languju et al., 2014).

Koreksi fiskal juga bisa dipahami sebagai modifikasi rencana keuangan wajib pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan sebelum menyetorkan pembayaran pajak (Kumalawati, 2018). Tujuan dilakukannya koreksi fiskal yaitu guna menyesuaikan besarnya laba menurut standar akuntansi keuangan serta besarnya laba menurut undang-undang perpajakan (Tulandi et al., 2018). Undang-Undang perpajakan hanya memberikan isu-isu tertentu, seperti pengakuan pendapatan dan biaya, dan tidak menetapkan format tetap untuk laporan keuangan (Widjaja, 2021). Jika Perusahaan ternyata menghitung pajak terhutang lebih besar seharusnya, maka modal kerja perusahaan akan terdistorsi atau terganggu yang dikarenakan adanya dana yang seharusnya bisa dijadikan modal kerja dan mengembangkan Perusahaan digunakan untuk membayar pajak yang sebenarnya bisa dikurangi (Gunawan, 2020).

Pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu dapat diselesaikan melalui pemotongan serta pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Membayar pajak merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, badan usaha dapat mengelola pajaknya guna memastikan hasil pajak yang akan dibayarkan minimal (Setiadi & Resnawati, 2021). Salah satu kewajiban pajak khususnya wajib pajak badan yaitu membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk Menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*), pada dasarnya penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain mengatur laporan keuangan SAK juga mengatur akuntansi pajak penghasilan pada PSAK No. 46 sedangkan laporan keuangan menurut pajak disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Akibat adanya koreksi fiskal, terjadi peningkatan laba komersial sebesar 11,42% sesuai dengan aturan yang berlaku. konsekuensinya, jelas bahwa penyesuaian yang menguntungkan menghasilkan keuntungan fiskal biaya yang disesuaikan secara positif bertambah, sementara secara fiskal berkurang (Notohatmodjo, 2013). Sedangkan hasil penelitian Ruth Hartina menunjukkan bahwa pendapatan dan biaya yang dikoreksi pada laporan keuangan fiskal sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan setelah dikoreksi sebesar Rp.0 karena sebelumnya Perusahaan tersebut mengalami kerugian pada tahun tersebut (Ruth Hartinah, 2019). Hasil penelitian Hartanti menjelaskan bahwa besarnya penghasilan kena pajak menurut perhitungan Perusahaan yang berbeda setelahnya dilakukan koreksi fiskal, masih ada selisih yang harus dibayar serta angsuran pajak penghasilan menurut pasal 25 (Hartanti & Fadjari, 2014). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya kesalahan dalam Perusahaan mengkoreksi pos tersebut, sehingga menimbulkan adanya biaya pajak terutang yang mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa untuk melakukan koreksi, Perusahaan belum melakukan sesuai undang-undang No.36 tahun 2008. Adapun pos menurut pajak dikoreksi tapi tidak dikoreksi yaitu bebang aji, beban tunjangan rumah, THR, BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan (Kellah & Kawulur, 2022). Pada hasil penelitian Tety erdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan (Rismawani & Nurchayati, 2016).

PT. Gresik Migas merupakan salah satu Perusahaan perseroan daerah yang bergerak dalam penyaluran pertama Minyak dan Gas Bumi yang kemudian disalurkan ke konsumen. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, PT. Gresik Migas berkewajiban melakukan perhitungan serta melaporkan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada UU perpajakan yang berlaku.

Setelah melakukan riset pada penelitian terdahulu, maka pembeda dari penilitia sebelumnya adalah adanya dampak hasil penelitian tentang rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada salah satu perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Secara garis besar peneliti melakukan perhitungan koreksi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada proses penelitian ini dapat dilakukan penyidikan secara menyeluruh serta sistematis, Analisa, tenang, serta ke hati-hati an dalam mendapatkan dan menghasilkan data yang akurat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi komersil dengan koreksi fiskal mengakibatkan selisih penghasilan dalam perhitungan PPh terutangnya sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap pendapatan, beban, dan pajak tangguhan untuk mengetahui besarnya penghasilan kena ppajak sebagai dasar

perhitungan PPh terutang, maka penulis tertarik untuk menganalisis koreksi fiskal atas pendapatan serta pajak tangguhan dalam penentuan pajak terutang pada Perusahaan.

KAJIAN TEORITIS

Rifka, (2020) kapasitas suatu perusahaan untuk menghasilkan uang dari operasinya dikenal dengan sebutan profitabilitas. Profitabilitas adalah metrik yang digunakan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi seberapa baik manajemen dalam menjalankan bisnis. Rasio profitabilitas merupakan alat yang berguna untuk mengevaluasi laporan keuangan dan menentukan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Pada penelitian ini disebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal guna menghasilkan laba yang sesuai dengan ketentuan fiskal. PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008, serta menghitung pajak penghasilan setelah koreksi fiskal, dan memiliki hasil bahwa masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi oleh perusahaan yang seharusnya biaya tersebut bisa dilakukan koreksi. Adanya kenaikan penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal positif serta koreksi fiskal negatif sehingga mempengaruhi besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayar (Sondakh, 2015).

Guna memenuhi kebutuhan pelaporan pajak PT. Proteksindo Utama Mulia Group telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada tahun 2019. Peneliti menyebutkan bahwa PT. Proteksindo Utama Mulia Group belum melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dikarenakan kurangnya pemahaman tentang cara menghitung koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yang berasal dari perusahaan tersebut maka perlu diadakannya koreksi fiskal. Akibat adanya koreksi fiskal terjadi kenaikan laba sebesar 54.4 % yang telah diakui oleh fiskal (Ernawati & Syahyuni, 2022).

Penghasilan serta pengeluaran guna menentukan kewajiban pajak penghasilan pada PT. DCN Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan karena adanya perbedaan koreksi fiskal. adanya selisih antara jumlah laba sebelum pajak sebesar Rp. 673.362.574 dengan berlandaskan SAK dan jumlah laba sebelum pajak yang berlandaskan perpajakan. Terdapat koreksi fiskal pada akun biaya karena merupakan beban yang tidak adanya keterkaitan dengan Undang-Undang pajak penghasilan (Ramadhanti A. & Dewi, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti keadaan suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu keadaan, suatu ide, atau peristiwa masa kini. Membuat deskripsi yang metodis, jujur, dan akurat tentang fenomena yang ada dapat dicapai melalui penerapan pendekatan deskriptif. Penelitian yang mengkarakterisasi variabel-variabel yang didukung oleh data numerik yang berasal dari situasi dunia nyata dikenal sebagai penelitian deskriptif kuantitatif (Pratama, 2019).

Dalam observasi kali ini, peneliti memakai penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan guna menjelaskan deskripsi uraian pada PT. Gresik Migas (Perseroda), dengan cara mengevaluasi bagaimana penerapan koreksi fiskal atas pendapatan, beban, dan perhitungan pajak tangguhan perusahaan guna menentukan PPH terutang pada perusahaan PT. Gresik Migas (Perseroda). Penelitian kali ini berfokus pada bagaimana praktik koreksi fiskal pada beban, pendapatan dan perhitungan pajak tangguhan yang diterapkan pada perusahaan guna menentukan besarnya PP yang terutang pada perusahaan PT. Gresik Migas (Perseroda). Penelitian ini dilakukan di PT. Gresik Migas (Perseroda) yang terletak di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 708, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61161.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Komersial PT. Gresik Migas (Perseroda)

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan data keuangan suatu perusahaan atau organisasi selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan dibagi menjadi dua penyajian, antara lain Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, asset, kewajiban, ekuitas serta arus kas pada periode tertentu. PT. Gresik Migas merupakan salah satu badan wajib pajak yang menjalankan pencatatan keuangannya sendiri dengan berlandaskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Mengenai Laporan Keuangan PT. Gresik Migas terlebih Laporan Laba Rugi dan Neraca yang bisa diamati sebagai berikut:

Tabel 1. Neraca Laporan Keuangan PT. Gresik Migas

Keterangan	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	10,478,468,049	14,045,917,432
Piutang Usaha	6,131,256,879	3,516,650,119
Piutang Lain-Lain	369,150,203	849,773,709
Persediaan	242,280,701	0
Pajak dan Biaya Dibayar Dimuka	384,583,059	281,833,466
JUMLAH ASET LANCAR	17,605,738,890	18,694,174,726
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	1,600,000,000	0
Investasi lain-lain	720,000,000	720,000,000
Obligasi Pemerintah	1,502,700,497	296,446,375
Harga Perolehan Aset Tetap	36,501,636,333	35,070,286,561
Akumulasi penyusutan Aset tetap	(8,112,932,398)	(7,223,188,413)
Properti Investasi	2,135,724,154	2,301,070,546
Aset lain-lain	63,374,992	54,249,996
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	34,410,503,579	31,218,865,065
JUMLAH ASET	52,016,242,469	49,913,039,792
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Usaha	4,370,514,944	2,144,587,092.00
Hutang Pajak	126,349,750	4,357,011
Biaya yang Masih Harus Dibayar	679,834,938	428,872,917
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	5,176,699,633	2,577,817,020
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1,074,535,164	1,615,994,525
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	445,002,265	491,882,113
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	1,519,537,429	2,107,876,638
JUMLAH KEWAJIBAN	6,696,237,062	4,685,693,658
EKUITAS		
Modal Saham	8,130,000,000	8,130,000,000
Selisih Aset dan Kewajiban Pengampunan Pajak	5,100,000	5,100,000
Saldo Laba	37,184,905,407	37,092,246,134
JUMLAH EKUITAS	45,320,005,407	45,227,346,134
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	52,016,242,469	49,913,039,792

Sumber: Data laporan keuangan PT. Gresik Migas, diolah 2024

Pada penelitian kali ini peneliti mengamati bahwa pada PT. Gresik Migas menjalankan pencatatan keuangannya sendiri dengan berlandaskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sedang berlaku. Laporan yang telah disusun dapat memberikan gambaran tentang operasional PT. Gresik Migas selama periode berjalan. PT. Gresik Migas juga memfasilitasi beberapa kelompok internal maupun eksternal yang tertarik dalam mengambil suatu Keputusan. Keputusan tersebut digunakan sebagai dasar nilai keuntungan yang dihasilkan oleh PT. Gresik Migas.

Laporan Keuangan Fiskal PT. Gresik Migas (Perseroda)

Guna memperoleh laba yang sesungguhnya, PT. Gresik Migas wajib melaporkan Kembali terhadap pencatatan keuangan yang telah disajikan. Dengan tujuan menyampaikan pedoman dalam menghiung penghasilan kena pajak. Praktek mengoreksi keuntungan komersial yang menyimpang dari ketentuan fiskal untuk menghasilkan laba bersih yang memadai dikenal sebagai koreksi fiskal.

Dalam pencatatan laporan keuangan fiskal, PT. Gresik Migas wajib berlandaskan peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang telah dibuat berlandaskan SAK wajib disesuaikan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung penghasilan kena pajak. Penyesuaian fiskal diperlukan karena adanya perbedaan gagasan, pengukuran, serta pengakuan pendapatan dan biaya antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Tujuan diadakannya koreksi fiskal guna memastikan bahwa besaran pajak penghasilan dapat dihitung dengan menyesuaikan laba dari pencatatan laporan komersial dengan laporan fiskal. Penyesuaian fiskal bisa berupa positif dan negatif yang berasal dari variasi perbedaan temporal dan tetap. Setelah dilakukannya penyesuaian antara komersial dengan fiskal, maka dapat diperoleh hasil keuntungan yang berbeda.

Dalam melakukan penyesuaian fiskal yang didasari pada peraturan perpajakan terkait, maka koreksi yang akan dilakukan adalah Laporan Laba Rugi Komesial yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang dihasilkan PT. Gresik Migas telah menjadi bahan pengamatan penulis.

Penyesuaian fiskal diperlukan pada saat pencatatan laporan laba rugi sesuai dengan peraturan Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK) No. 46. Dari penemuan tersebut membuktikan bahwa koreksi fiskal dalam koreksi fiskal atas laporan laba rugi pada periode per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 atas PT. Gresik Migas.

1. Perbedaan Tetap

- a. Biaya Transportasi, berdasarkan table 2 pada tahun 2021 sebesar Rp. 48.479.453 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 130.117.124, biaya transportasi dipergunakan

untuk kepentingan direksi hal tersebut telah diatur dalam UU Pasal 9 (1) (b) yang berbunyi “beban yang dibebankan sebagai kebutuhan pribadi pemegang saham, kolega, ataupun anggota tidak boleh dimasukkan pada biaya”.

- b. Saldo laba merupakan laba bersih yang tidak dibayarkan sebagai deviden tetapi diakumulasikan selama masa usaha Perusahaan dan akan dilaporkan pada bagian kekayaan bersih atau ekuitas di dalam laporan posisi keuangan, maka berdasarkan table 2 pada laporan keuangan PT. Gresik Migas pada tahun 2021 sebesar Rp. 37.092.246.134 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 37.184.905.407.

2. Perbedaan Temporer

- a. Biaya Gaji, akun ini direvisi karena menurut perhitungan fiskal beban penyusutan berjumlah Rp. 2.543.832.812, sedangkan menurut laporan komersial beban penyusutan berjumlah Rp. 3.111.957.935. Adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh penyusutan, oleh karena itu pemotongan biaya gaji perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 568.125.123,-.
- b. Biaya Pajak, akun ini direvisi karena menurut perhitungan fiskal beban penyusutan sebesar Rp. 25.250.910, sedangkan menurut laporan komersial Rp. 151.051.857. adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh potongan pajak perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 125.800.947
- c. Biaya Pajak, akun ini direvisi karena menurut perhitungan fiskal beban penyusutan sebesar Rp. 181.304.029, sedangkan menurut laporan komersial Rp. 289.693.637. adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh potongan pajak perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 108.389.608
- d. Biaya Komunikasi dan Koran, akun ini direvisi karena menurut perhitungan fiskal beban penyusutan sebesar Rp. 43.331.252, sedangkan menurut laporan komersial Rp. 47.268.002. adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh potongan pajak perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 3.936.750
- e. Biaya Kendaraan, akun ini direvisi karena menurut perhitungan fiskal beban penyusutan sebesar Rp. 74.690.607, sedangkan menurut laporan komersial Rp. 81.602.655. Adanya perbedaan dikarenakan akibat potongan biaya kendaraan yang telah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 6.912.048.
- f. Biaya Pengembangan SDM, akun ini direvisi karena menurut perhitungan fiskal beban penyusutan sebesar Rp. 13,129,500, sedangkan menurut laporan komersial Rp. 35.225.100. Adanya perbedaan dikarenakan akibat potongan biaya kendaraan yang telah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 6.912.048.

3. Pajak Penghasilan Terutang PT. Gresik Migas

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang merupakan bagian dari UU Pajak Penghasilan terkini, mengatur bahwa pajak yang dihasilkan diperoleh dari orang pribadi atau badan. Didalanya memuat pedoman mengenai pos-pos perpajakan, subjek pajak.

Tabel 2. Pajak Terutang PT. Gresik Migas

Pajak Terutang			
	2021		2022
Rp	4,357,011	Rp	126,349,750

Sumber : Data laporan keuangan PT. Gresik Migas, diolah 2024)

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada 2021 PT. Gresik Migas memiliki Pajak Terutang sebesar Rp. 4.357.011,- dan pada tahun 2022 PT. Gresik Migas memiliki Pajak Terutang sebesar Rp. 126.349.750,-

Setelah mengetahui hasil antara perbedaan tetap dan perbedaan temporer, maka baru bisa membuat laporan laba/rugi fiskal berdasarkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Laporan Keuangan 2021 PT. Gresik Migas

Pos-Pos	2021		
	Biaya Komersial	Koreksi (+)	Biaya Fiskal
Penjualan	Rp 33,019,011,846		Rp 33,019,011,846
Beban Langsung	Rp 28,511,217,081		Rp 28,511,217,081
Laba Kotor	Rp 4,507,794,765		Rp 4,507,794,765
Beban Usaha :			
Beban Admin dan Umum			
Beban Gaji	Rp 3,111,957,935	Rp 568,125,123	Rp 2,543,832,812
Biaya Pajak	Rp 151,051,857	Rp 125,800,947	Rp 25,250,910
Beban Perjalanan Dinas	Rp 48,479,452		Rp 4,879,453
Beban Representasi dan Entertainment	Rp 63,281,200	Rp 63,281,200	0
Beban ATK, Jilid dan Foto Copy	Rp 18,971,944		Rp 18,971,944
Beban Sewa Kantor dan Wisma	0		0
Beban Komunikasi dan Koran	Rp 48,511,030	Rp 2,285,000	Rp 46,226,030
Beban Kendaraan	Rp 78,297,938		Rp 78,297,938
Beban PLN, PDAM	Rp 92,585,051		Rp 92,585,051
Beban Pantry dan Lain-lain	Rp 29,347,768		Rp 29,347,768
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	Rp 896,968,019		Rp 868,693,019
Beban Penyusutan Aktiva Lain-lain	Rp 3,875,004		Rp 3,875,004
Beban Penyusutan Properti Investasi	Rp 165,346,392		Rp 165,346,392

Beban Konsultan	Rp	106,000,000		Rp	106,000,000	
Beban Rapat	Rp	251,440,583		Rp	251,440,583	
Beban Pengembangan Usaha & Perijinan	Rp	51,770,809		Rp	51,770,809	
Beban Pengembangan SDM	Rp	81,602,655	Rp	6,912,048	Rp	74,690,607
Beban Pemeliharaan	Rp	375,220,100		Rp	375,220,100	
Jumlah Beban Usaha	Rp	5,547,707,738		Rp	4,780,028,420	
Laba Usaha	-Rp	1,039,912,974		-Rp	272,233,656	
Pendapatan & Beban Lain-lain :						
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	Rp	318,465,324			0	
Pendapatan Lain-lain	Rp	23,675,763		Rp	23,675,763	
Pendapatan Sewa	Rp	678,565,938			0	
Bunga FR BCA	Rp	13,071,352			0	
Pendapatan Amend Program UU Cipta Kerja	Rp	310,290,335			0	
Pendapatan Selisih Kurs	Rp	437,290,335		Rp	437,186,573	
Beban Administrasi Bank	Rp	436,186,573		-Rp	3,266,875	
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	-Rp	3,266,875			0	
Biaya Pajak Giro		0	Rp	1,679,615	0	
Beban Denda Pajak	-Rp	2,679,615	Rp	732,105	0	
Beban Penurunan Nilai Investasi Entitas Asosiasi	-Rp	732,105			0	
Kerugian Selisih Kurs		0		-Rp	471,982,448	
Rugi Penjualan Aktiva Tetap	-Rp	471,982,448			0	
Denda Keterlambatan Pemby Invoice		0			0	
Biaya Survey		0			0	
Beban Lain-lain		0		-Rp	14,393,292	
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain	Rp	1,303,587,737		-Rp	286,627,148	
Laba usaha Sebelum Zakat	Rp	263,674,764			0	
Biaya Zakat		0		-Rp	286,627,148	
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp	263,674,764		-Rp	286,627,000	
Taksiran Pajak Penghasilan		0			0	
Laba (RUGI) Usaha	Rp	263,674,764		-Rp	286,627,000	

Sumber: Data laporan keuangan PT. Gresik Migas, diolah 2024

Data yang telah tersaji diatas berelevan dengan penelitian (Rismawani A Tety, 2016).

Tabel 4. Laporan Keuangan 2022 PT. Gresik Migas

2022			
Pos-Pos	Biaya Komersial	Koreksi (+)	Biaya Fiskal
Penjualan	Rp 34,972,472,064		Rp 34,972,472,064
Beban Langsung	Rp 30,145,485,853		Rp 30,145,485,853
Laba Kotor	Rp 4,826,986,211		Rp 4,826,986,211
Beban Usaha :			
Beban Admin dan Umum			
Beban Gaji	Rp 3,443,704,526	Rp 1,504	Rp 3,443,103,022
Biaya Pajak	Rp 289,693,637	Rp 108,389,608	Rp 181,304,029
Beban Perjalanan Dinas	Rp 130,117,124		Rp 130,117,124
Beban Representasi dan Entertainment	Rp 114,188,786	Rp 114,188,786	0
Beban ATK, Jilid dan Foto Copy	Rp 18,592,700		Rp 18,592,700
Beban Sewa Kantor dan Wisma	Rp 41,047,823		Rp 41,047,823
Beban Komunikasi dan Koran	Rp 47,268,002	Rp 3,936,750	Rp 43,431,525
Beban Kendaraan	Rp 106,830,749	Rp 37,891,426	Rp 68,939,323
Beban PLN, PDAM	Rp 110,015,990		Rp 110,015,990
Beban Pantry dan Lain-lain	Rp 65,144,173		Rp 65,144,173
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	Rp 889,743,985	Rp 1,275,000	Rp 888,468,985
Beban Penyusutan Aktiva Lain-lain	Rp 3,875,004		Rp 3,875,004
Beban Penyusutan Properti Investasi	Rp 165,346,392	Rp 165,346,392	0
Beban Konsultan	Rp 242,957,510		Rp 242,957,510
Beban Rapat	Rp 320,811,052		Rp 320,811,052
Beban Pengembangan Usaha & Perijinan	Rp 136,600,555		Rp 136,600,555
Beban Pengembangan SDM	Rp 35,225,100	Rp 22,095,600	Rp 13,129,500
Beban Pemeliharaan	Rp 428,383,116		Rp 428,383,116
Jumlah Beban Usaha	Rp 6,589,546,224		Rp 6,136,421,158
Laba Usaha	-Rp 1,762,560,013		-Rp 1,309,434,947
Pendapatan & Beban Lain-lain :			
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	Rp 250,666,655		0
Pendapatan Lain-lain	Rp 1,683,667,510		Rp 1,683,667,510
Pendapatan Sewa	Rp 705,708,577		0
Bunga FR BCA	Rp 64,709,854		0
Pendapatan Amend Program UU Cipta Kerja	0		0
Pendapatan Selisih Kurs	Rp 668,804,080		Rp 668,804,080
Beban Administrasi Bank	-Rp 4,897,987		-Rp 4,897,987
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	0		0
Biaya Pajak Giro	-Rp 14,342,320	Rp 14,342,320	0
Beban Denda Pajak	-Rp 17,058,895	Rp 17,058,895	0
Beban Penurunan Nilaian Investasi Entitas Asosiasi	0		0
Kerugian Selisih Kurs	-Rp 361,212,062		-Rp 361,212,062

Rugi Penjualan Aktiva Tetap	0	0
Denda Keterlambatan Pemby Invoice	0	0
Biaya Survey	0	0
Beban Lain-lain	Rp 7,296	Rp 7,296
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain	Rp 2,976,052,708	Rp 1,986,368,837
Laba usaha Sebelum Zakat	Rp 1,213,492,695	Rp 676,933,890
Biaya Zakat	0	0
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp 1,213,492,695	Rp 676,933,890
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp 120,833,423	0
Laba (RUGI) Usaha	Rp 1,092,659,272	Rp 676,933,000

Sumber: Data laporan keuangan PT. Gresik Migas, diolah 2024

Data yang telah tersaji diatas berelevan dengan penelitian (Prang Buwono, 2012).

Laporan Keuangan PT. Gresik Migas

Hasil penelitian mengatakan bahwa laba pada laporan keuangan komersial tahun 2022 PT. Gresik Migas mengalami kenaikan dari 2021. Pada tahun 2021 laba rugi usaha berjumlah Rp. 263.674.764 sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,092,659,272. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan pada PT. Gresik Migas. Namun data tersebut hanya berlandaskan pada laporan keuangan komersil maka PT. Gresik Migas perlu melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan. PT. Gresik Migas juga telah Menyusun laporan keuangan dengan pedoman Standar Akuntamsi Keuangan dan telah sesuai pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, perlu adanya koreksi pada laporan laba rugi komersial untuk membuat laporan laba rugi fiskal.

Hal tersebut digunaka dengan menggunakan laporan keuangan komersial, yang pada dasarnya adalah data perusahaan berupa laporan laba. Pada tahun 2021 terdapat 8 akun pada laporan Laba Rugi yang dikoreksi secara positif, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 10 akun pada laporan laba rugi secara positif. Akun yang dikoreksi fiskal diataranya yaitu, Biaya pajak giro, beban denda pajak, biaya gaji, biaya pajak, biaya representasi dan entertainment, biaya komunikasi dan koran, beban kendaraan, beban penyusutan aktiva tetap, biaya penyusutan properti investasi, biaya pengembangan SDM. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, setelah dilakukan koreksi fiskal maka jumlah laba sebelum pajak meningkat, dapat diperikan bahwa jumlah pajak terutang juga akan meningkat. Perhitungan pajak menurut SAK dan menurut fiskal dapat diperhitungkan kompensasi kerugian yang merupakan kerugian akumulatif yang berasal dari periode sebelumnya.

Dalam laporan keuangan PT. Gresik Migas ini perhitungan penghasilan terhutang telah sesuai dengan pasal 36 UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada penyajian laporan laba rugi yang telah disusun oleh PT. Gresik Migas dapat dilihat bahwa besar beban PPh Terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Setelah adanya koreksi fiskal biaya yang harus dibayar oleh PT. Gresik migas pada tahun 2021 sebesar Rp. 428,872,917 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 679,834,938, pada tahun 2021 PT. Gresik Migas memperoleh margin laba sebesar Rp. 13,65% sedangkan pada tahun 2022 PT. Gresik Migas memperoleh margin laba sebesar 13,80%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan bagi perusahaan memberikan gambaran mengenai keuangannya. Pencatatan keuangan PT. Gresik Migas disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), meliputi laporan Laba Rugi dan Neraca. Laporan-laporan ini digunakan oleh kelompok internal maupun eksternal untuk mengambil keputusan dan menghitung penghasilan kena pajak.

Guna memastikan perhitungan pajak yang akurat, koreksi fiskal dilakukan terhadap laba komersial agar sesuai dengan ketentuan fiskal. Penyesuaian fiskal dapat bersifat positif maupun negatif dan diwajibkan oleh peraturan akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK) No. 46. Penyesuaian tersebut dilakukan laba rugi komersial dan dapat diakibatkan oleh perbedaan gagasan, pengukuran, dan pengakuan pendapatan dan biaya antara Perusahaan satu dengan Perusahaan lainnya.

Selisih tetap dalam koreksi fiskal mencakup biaya transportasi dan laba ditahan. Biaya transportasi guna kepentingan direksi tidak dapat dimasukkan dalam beban, sedangkan laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak dibayarkan sebagai dividen tetapi diakumulasikan selama masa usaha. Perbedaan sementara koreksi fiskal meliputi biaya gaji, biaya pajak, biaya komunikasi dan koran, biaya kendaraan, dan biaya pengembangan SDM. Perbedaan tersebut disebabkan oleh variasi perbedaan temporal dan tetap, dapat mengakibatkan koreksi positif maupun negatif. Adanya kenaikan margin laba PT. Gresik Migas dari tahun 2021 – 2022 sebesar 0,20%, kenaikan margin laba juga dipengaruhi oleh harga pokok, penjualan serta biaya pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Sitorus, Anggi Pratiwi, and Owen De Pinto Simanjuntak. 2023. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi Di PT Sukses Anugrah Sejahtera." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23(1): 188.
- Langsa, Herlin Rombe, Firman Menne, and Thanwain. 2017. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Toarco Jaya Makassar." *Jurnal riset edisi XIII* 3(002): 44–57.
- Louis. 2021. "Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Thermoplast Indo." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 3(3): 1141.
- Lidyah, Rika, and Elisa Delima Sari. 2008. "No TitleМаркетинг По Котлеру." : 282.
- Ainiyah, Nur. 2018. "Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban Dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia." *Prive: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 1(1): 58–72. <http://ejournal.unim.ac.id/index.php/prive>.
- 'Ulhaq, Akhmad Ryan Dhiya. 2021. "Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan Psak 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari Sisi Penyewa." *Jurnal Acitya Ardana* 1(2): 84–108.
- Tulandi, Mesias Ridel, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan. 2018. "Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pph Badan Pada Pt. Empat Tujuh Abadi Jaya." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(02): 432–41.
- Kumalawati, Lely. 2018. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist." *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* 2(1): 25–32.
- Languju, Ryan C.C, Jantje J. Tinangon, and Inggriani Elim. 2014. "Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung." *Jurnal EMBA* 2(3): 1101–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5782/5315>.
- Undang-Undang Nomor 7. 2017. "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)." *Akun Covid* 12(November): 1–68. www.djpk.depkeu.go.id.
- UU_No.16. 2000. "No Titleزراعت غلات." (1645): 1–76.
- Fakhruzy, Agung. 2020. "Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9(2): 84–94. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1059>.
- Setiadi & Resnawati, 2021. 2021. "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pph Badan Terutang Pada Manufaktur Company Bidang Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya* 6(1): 35–46.
- UU_No.28. 2007. "No TitleЫВМЫВМЫВ." *UU_2007_28* ы12y(235): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Ngadiman, Elvina Desideria. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 1(2): 355.
- Ramadhanti A., Fauzia Salsabila, and Santi Rahma Dewi. 2023. "Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban Dan Pajak Tangguhan Untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Yang Terutang Pada PT. DCN Indonesia." *Innovative Technologica:*

Methodical Research Journal 2(4): 1–15.

- Ernawati, Ernawati, and Syahyuni Syahyuni. 2022. “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada Pt. Proteksindo Utama Mulia.” *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)* 3(2): 50–60.
- Sondakh, Steffani Gabriella. 2015. “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3(4): 357–68.
- Salindeho, Alfred. 2022. “Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC.” *Jambura Agribusiness Journal* 3(2): 76–86.
- Dewi, Yuliani et al. 2022. “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2(2): 320–26.
- Iskandar, Agus, and A. Haris Rangkuti. 2008. “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Tunai Pada Pt. Klaten Bercahaya.” *Jurnal Basis Data, ICT Research Center UNAS* 3(2): 124–31.
- Tumalun, Tommy L.H, and Sonny Pangerapan. 2019. “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Di PT Nusantara Sakti Cabang Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7(3): 3019–28.
- Dean, Dennis R. et al. 1993. “No Titleمتداولترین گیاهها.” *Explorations in Economic History* 24(6): ETG 5-1-ETG 5-17. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2020.101342>.
- Pratama, Yanuar Ramadhan. 2019. “Efektivitas Aplikasi Siprakastempra Terhadap Pelayanan Pkl Di Smk Muhammadiyah Prambanan Sleman.” *Eprints Uny*: 1–23.
- Wati, A. 2023. “Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba.” *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* 19(2): 121–34. <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA/article/view/113>.
- Lumingkewas, Valen A. 2013. “Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Fauziyah. 2022. “Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Yang Terhutang Pada Pt. Bakti Mandiri Perkasa.” 3(4): 203–16.
- Yundari, Tri, and Dwi Artati. 2021. “Jurnal Ilmiah Manajemen Keuangan - 12 Agustus 2021.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Keuangan*.
- Rismawani, Tety Aprilla, and Nurchayati. 2016. “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang).” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 5(1): 73–83.
- Kellah, Sisilia, and Hisky Kawulur. 2022. “Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Paraloba Tondano.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 3(3): 527–35.
- Hartanti, and Kenny T. Fadjar. 2014. “Analisa Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Pada Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners.” I(1): 10–23.
- Ruth Hartinah, Watuseke. 2019. “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pph Pada Pt . Air Manado.” *Jurnal EMBA* 7(3): 4183–92.
- Notohatmodjo, B. Siehakso. 2013. “ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN

KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT CITRA TUMBUH LESTARI TAHUN PAJAK 2013 B. Soehakso Notohatmodjo Politeknik Sawunggalih Aji.” : 1–15.

Gunawan, Kahar. 2020. “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus Pada CV. X).” *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 11(1): 828–32. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2129>.

Widjaja, Helen. 2021. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019.” *Jurnal Paradigma Akuntansi* 3(2): 784